

**PENGARUH KONFLIK GAM-RI DI BIDANG POLITIK
DAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT ACEH TAHUN 1976-
2012**

Eriyen Hertiana

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
Email: Eriyen.hertiana@gmail.com

Kian Amboro

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
Email: kianamboro@ummetro.ac.id

Abstrack

The problem faced in this research is how the influence of GAM-RI conflict is politically and socially on the lives of the people of Aceh especially in 1976-2012. The purpose of this study is to describe how the GAM-RI conflict, as well as explaining the influence of Aceh community in political and social fields. While this study is a historical study. In this study, using the methods of literary study. Data collection techniques in this study using the steps that heuristic and literature study. In testing the correctness of the data or the validity of data collection used internal and external criticism, while for the method of data analysis is the interpretation and historiography. Based on the research activities have been implemented, the effect of GAM-RI conflict in 1976-2012 in the field of politics is the enactment of the Military Operations Area and Military Emergency in Aceh as well as the emergence of Local Political Parties in Aceh. While the influence of the social field is to start the collapse of traditional values and norms that exist in Aceh and the change in attitude due to the impact felt by the people of Aceh conflict.

Keywords: *Conflict, the Freedom Aceh Movement, Political, Social and Aceh*

PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Kota Aceh pada zaman di mana perdagangan dunia terjadi, berada pada jalur yang sangat strategis. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh M. D. Madjid (2014:87) "Aceh terletak dua mil dari punggung pantai dan 3 mil dari kaki bukit. Kedudukannya yang tak jauh dari hulu hilir ini, menjadikan Aceh sebagai permata hijau namun juga biru".

Namun sebelum membahas pada konflik di Aceh yakni konflik antara GAM-RI, sebenarnya jika membahas sejarah pertumpahan darah di Aceh dimulai dari perang dengan orang Portugis tahun 1519, penjajahan Belanda tahun 1873-1913, dan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953 (Nasruddin, 3:2014).

Pertumpahan darah yang terakhir ini disebut dengan Darul Islam yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) atas wilayah Indonesia serta ada

beberapa faktor lainnya. Namun konflik dalam pemberontakan ini berakhir di tahun 1959 dengan jalan damai. Menurut Van Dick (1983:255) :

Berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan lain yang di ilhami Darul Islam, pemberontakan yang khusus ini berakhir secara damai melalui permusyawaratan ketimbang kekalahan militer. Hal ini terjadi akibat Pemerintahan Pusat pada 1959 akhirnya memenuhi tuntutan yang gigih dari rakyat Aceh dan memberikan daerah itu status Provinsi Istimewa, dengan otonomi bidang agama, hukum adat, dan pendidikan.

Dari pernyataan di atas dapat diambil pengertian bahwa konflik Darul Islam ini berdamai secara cepat karena dilakukan langsung dengan beberapa perundingan dengan pemberian beberapa Hak istimewa untuk Aceh. Konflik memuncak kembali di Aceh setelah Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka di Pidie, Aceh pada tahun 1976. Beberapa hal yang mendasari munculnya konflik GAM-RI ini adalah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Aceh ini menurut Syamsul Hadi (2007:50) yakni :

Pada masa Orde Baru kebijakan pemerintah ditekankan pada pembangunan yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Aset-aset sumber daya Alam Aceh banyak di eksploitasi dalam konteks pembangunan ini. Pabrik LNG dan PT pupuk Iskandar Muda yang dibangun di Aceh maju dan pesat, bahkan Indonesia menjadi salah satu eksportir LNG terbesar dan 90% dari produksi pupuk ditujukan pada ekspor.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa Aceh ini memiliki potensi yang sangat banyak, namun karena pada masa kebijakan Orde Baru ini rakyat Aceh belum bisa merasakan apa yang mereka miliki karena semua kontrol outputnya yang dikuasai rezim Orde Baru dan kebijakan industri di Aceh yang terkonsentrasi ke pusat saja. Aceh yang menjadi Provinsi yang istimewa betul-betul merasakan keterpurukan. Perubahan itu juga tidak terjadi ketika ditemukan ladang gas di Arun, Aceh Utara. Mengapa demikian, menurut Al Chaidar (1999:140) :

Bersamaan dengan terjadinya krisis di Indonesia penemuan ladang Gas alam di Arun, Aceh Utara. Pemerintahan berusaha mempercepat dalam pengeksploitasinya. Dalam waktu yang singkat daerah sekitar penemuan sumber gas alam tersebut telah berubah jadi medan pembangunan besar-besaran. Miliaran dollar AS dikururkan untuk mendanai proyek raksasa.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa Aceh adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam karena terbukti dengan ditemukannya ladang gas namun setelah ditemukannya ladang gas di Arun, rakyat belum bisa merasakannya

dengan baik. Selain beberapa hal tersebut yang menjadikan rakyat Aceh sangat merasa kecewa terhadap pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan pemerintahan di Aceh didominasi oleh orang suku Jawa (Rakhmad Fadil, 2009:20).

Ketika membahas akan tata letak, batas wilayah bahkan kondisi hidrologi dan klimatologi di Aceh yang menjadikan Aceh sebagai wilayah setrategis ini adalah karena dalam [\(http://www.Acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-Aceh.html\) :](http://www.Acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-Aceh.html)

Provinsi Aceh secara geografis Aceh antara 01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 Provinsi Aceh memiliki kondisi klimatologi yang tercatat, persentase lamanya penyinaran matahari dengan jumlah penyinaran matahari maksimum terjadi antara pukul 10.00-11.00 WIB yaitu sebesar 8,6 persen dan jumlah penyinaran matahari terendah terjadi antara pukul 15.00-16.00 Wib sebesar 4.5% Sedangkan kondisi hidrologi di Aceh terdapat 408 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar sampai kecil. Aceh memiliki beberapa danau seperti Danau Laut Tawar di Aceh Tengah dan Danau Aneuk Laot di Sabang, juga memiliki rawa seluas 444.755 ha, yang terdiri dari rawa lebak seluas 366.055 ha dan rawa pantai seluas 78.700 ha.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian yaitu dengan tata letak, batas wilayah dan lahan-lahan bahkan kondisi iklim dan air di Aceh inilah yang menjadikan Aceh menjadi daerah yang sangat setrategis. Karena wilayahnya yang setrategis ini menjadikan incaran bagi orang-orang untuk memanfaatkan kondisi alam Aceh. Maka sebenarnya konflik GAM-RI ini diawali oleh keadaan alam Aceh yang sangat setrategis. Namun ketika gerakan separatis ini terbentuk, pemerintahan pusat melakukan beberapa perlawanan yakni (Al Chaidar, 1999:153) :

Pada awal bulan Juni, 1977 aparat keamanan semakin meningkatkan perang psikologis (*psy-war*) untuk melawan ASNLF (*Aceh Sumatra National Liberation Front*) dan pemimpin-pemimpinnya di tengah masyarakat. *Psy-war* ini terkadang diikuti dengan serangkaian *shock therapy* dengan cara menyiksa orang-orang Aceh secara biadap. Sejumlah penangkapan terhadap para pengikut ASNLF dilancarkan yang disertai dengan siksaan. Menurut penuturan saksi sejarah, ribuan orang termasuk wanita dan anak-anak di tangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa jalur pengadilan, dan banyak tahanan yang disiksa dan dibunuh.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa pemerintahan pusat langsung menindaklanjuti adanya Gerakan Aceh Merdeka tersebut, tanpa melihat apakah orang Aceh ini anggota GAM atau hanya warga sipil saja. Namun pada dasarnya para anggota GAM juga melakukan tindakan teror terhadap masyarakat

Aceh dan merusak pos-pos TNI atau polisi di Aceh (yang diturunkan pemerintahan pusat). Lalu bagaimana cara anggota GAM ini merekrut masyarakat Aceh untuk menjadi anggota GAM, karena pada awalnya anggota GAM hanya beberapa orang saja. GAM melakukannya dengan cara memberitahu bahwa GAM merupakan wadah yang tepat bagi rakyat Aceh dalam menjalankan aktifitas ke-Islamannya, dan mengajak kepada rakyat desa untuk bersama-sama memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi cita-cita rakyat Aceh pada umumnya. Sedangkan kepada masyarakat Aceh yang ada di kota yaitu membangun opini yang bernada provokatif dengan menjelaskan bahwa perjuangan yang mereka cita-citakan adalah sah dimata hukum.

Dengan tokoh-tokoh pelopor seperti Daud Beureueh dan Hasan Tiro ini konflik Aceh dapat bertahan kurang lebih 30 tahun. Dengan berbagai pendukung kalangan dari masyarakat Aceh Menurut Julien Benda dalam skripsi Kurnia (2010:44) :

Gerakan Aceh Merdeka ini setidaknya di dukung oleh tiga kelompok masyarakat Aceh yaitu golongan intelektual dan golongan profesional, golongan ulama dan golongan biasa.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa semakin hari konflik berlanjut ada beberapa pendukung dari gerakan separatis tersebut. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Aceh yang semakin hari tidak ada akhirnya membuktikan bahwa strategi yang digunakan pemerintah tidak berhasil. Dengan pemerintahan pusat menggunakan strategi militer dan kekerasan malah tidak membuat rakyat jera malah semakin bertambah pendukung GAM ini karena adanya sikap balas dendam. Dengan berbagai perundingan yang dilaksanakan oleh beberapa presiden Indonesia yang terus berganti akhirnya hingga awal tahun 2005 terjadi perubahan paradigma baru di Aceh dengan kesepakatan bersama mengakhiri konflik berdarah sejak 1976 karena bencana tsunami telah mengubah menjadi suasana damai, dengan adanya bencana tsunami yang melanda di Aceh yang memakan korban jiwa, menurut Harry (2008:170) :

Bencana Tsunami di Aceh menyebabkan sekitar 230 ribu jiwa meninggal dunia, 36.786 hilang dan 174.000 jiwa tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sekitar 120.000 rumah hancur, 800 km jalan dan 260 jembatan rusak, 639 fasilitas kesehatan hancur dan serta 2.224 sekolah hancur dan rusak. Kerugiannya diperkirakan mencapai 4,5 miliar dolar Amerika.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa gempa tsunami di Aceh sangat dahsyat banyak menelan korban jiwa dan kerugian-kerugian besar terjadi.

Sehingga bencana ini menyentuh rasa kemanusiaan penduduk dunia dan sejak itu Aceh banyak dikenal oleh dunia dalam internasional sehingga negara lain mengetahui permasalahan konflik kekerasan yang terjadi di negara Indonesia tersebut. Tsunami yang menghancurkan sebagian besar pantai Aceh ini membawa paradigma baru, setelah seminggu pasca tsunami GAM melakukan sepakat untuk berunding untuk, dan pada tanggal 2 Januari 2005 di Helsinki kedua pihak menandatangani deklarasi (lia:2015). Menurut Harry kawilarang (2008:176) :

Pada 27 Februari 2005 pihak GAM dan pemerintahan Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisari berperan sebagai fasilitator. Pada 17 juli 2005 setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding indonesia mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa. Penandatanganan nota kesepahaman damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005 dan proses selanjutnya dipantau oleh AMM (*Aceh Monitoring Mission*).

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada akhirnya konflik GAM-RI ini mencapai puncak perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan beberapa syarat. Namun jika kita kaji kembali bagaimana konflik GAM-RI ini mampu bertahan sampai kurang lebih 30 tahun, 30 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Jika dilihat konflik GAM-RI ini bisa bertahan lama juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Aceh itu sendiri menurut menurut (Faisal:2015) :

Ciri-ciri orang Aceh (Atjeh) adalah *Agamis* (Orang Aceh menjunjung tinggi kebebasan beragama umat lainnya dan menghormati pemeluk agama lainnya selama saling menghormati), *Taat* (Orang Aceh terkenal setianya jika sudah mengenal baik atasan, teman, tetangga dan lingkungannya. Mereka akan patuh dan taat menjalankan tugas-tugasnya), *Jihadis* (Orang Aceh melakukan pekerjaan sama dengan berjuang), *Etis/Beretika* (Menghargai orang lain), *Humanis* (Dalam setiap dimensi mengedepankan kebersamaan dan persaudaraan).

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa beberapa ciri-ciri orang Aceh ini dapat mempertahankan bumi pertiwinya, misalnya diambil contoh Jihadis mereka akan melakukan pekerjaan sama dengan berjuang di jalan Allah, jika mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu benar maka mereka akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan, misalnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam sampai melakukan berbagai pemberontakan yang disebut dengan Darul Islam.

Mereka pejuang yang sangat kuat keyakinannya terhadap ajaran agama tetapi juga tergolong mampu membangun pertahanan yang sulit sekalipun. Semangat rela berkorban, berjuang dan berperang sampai titik darah penghabisan yang sekian lama

itu malah lantas mengental, mengkristal jadi sebuah budaya yang melekat erat dalam setiap karakter masyarakat Aceh. Selain sikap militan yang dimiliki masyarakat Aceh ada beberapa watak menurut Mohd. Harun yang dikutip dari (AcehTourism:2014) :

Militan (Artinya memiliki semangat juang yang tinggi), *Reaktif* (Artinya sebagai sebuah sikap awas atas harga diri yang keberadaannya dipertaruhkan dalam konstelasi sosial budaya), *Konsisten* (Hal ini tampak dalam sikap dan pendirian yang tidak plin plan, tegas, taat. Apalagi jika berkaitan dengan harga diri dan kebenaran), *Optimis* (Tampak dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu), *Loyal* (Tampak dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu).

Dari kutipan diatas dapat diambil pengertian bahwa karakteristik masyarakat Aceh juga mempengaruhi bagaimana proses konflik GAM-RI ini, jika mereka tidak memiliki watak maupun sifat di atas maka kemungkinan besar konflik GAM-RI ini tidak sebegitu lamanya terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah adalah ketidakstabilannya kondisi politik dan sosial di Aceh maka tidak dapat terlepas dari adanya konflik GAM-RI. Maka berdasarkan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konflik GAM-RI di bidang politik maupun sosial terhadap kehidupan masyarakat Aceh tahun 1976-2012?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah dapat mengetahui atau memaparkan pengaruh konflik GAM-RI ini di bidang politik dan sosial terhadap kehidupan masyarakat Aceh tahun 1976-2012.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan dihadapkan pada tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penulisan Menurut Gilbert J. Garragan yang dikutip dari (Daliman, 2012: 27) menjelaskan bahwa :

Metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapainya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa metode sejarah adalah suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam yang dilakukan oleh peneliti untuk membantu peneliti menguji dan menganalisis secara kritis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber serta menguji data-data tersebut agar

bersifat fakta dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode historis dengan melakukan studi kepustakaan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku sumber sejarah atau dokumen-dokumen yang terdapat di perpustakaan (Abdurahman, 2011: 105). Berikut ini adalah beberapa langkah dalam pengumpulan data ada heuristik. Heuristik merupakan kegiatan awal kerja dari seorang peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber data sejarah yang akan dikaji (Daliman, 2012: 45). Kata Heuristik berasal dari kata "heuriskein" dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau menemukan. Maka disini penulis harus mengumpulkan terlebih dahulu sumber ataupun referensi dari buku, dokumen-dokumen sejarah ataupun jurnal online.

Maka setelah data dikumpulkan untuk menentukan keaslian atau keabsahan sumber harus diketahui melalui kritik sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumbernya. Kritik atau verifikasi itu ada dua macam : keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kritik intern (Abdurahman, 2011: 108). Dimana Kritik Ekstern digunakan untuk menguji otentistas (keaslian) suatu sumber, kritik ekstern terdiri dari nama pengarang sumber dan waktu pembuatan sumber. Maka setelah itu kritik intern yakni digunakan untuk menguji kredibilitas dokumen secara benar dan akurat. Untuk mengetahui kesesuaian sumber data.

Setelah menentukan keaslian maka metode dalam menganalisis data ada interpretasi dan historiografi. Interpretasi adalah juga disebut dengan menguraikan dan menganalisis. Menurut Daliman (2012: 81) :

Interpretasi merupakan suatu tahap sebuah penelitian yang digunakan untuk menafsirkan atau memberikan makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Kemudian hasil dari interpretasi digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

Dalam kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa interpretasi adalah suatu langkah dalam sebuah penelitian sejarah yaitu dengan menafsirkan suatu fakta-fakta sejarah atau bukti-bukti sejarah agar teruji validitas dan realibilitasnya. Setelah melakukan analisis penafsiran langkah terakhir dalam sebuah penelitian sejarah adalah melakukan penulisan sejarah menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi (Daliman, 2012: 99).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dari penelitian yang sudah dilakukan maka ada beberapa pengaruh terhadap masyarakat Aceh ketika konflik GAM-RI ini berlangsung. Pengaruh dalam bidang politik terhadap masyarakat Aceh ini adalah karena pada awalnya pada masa Soeharto GAM dipandang sebagai gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga hal tersebut mengganggu pemerintahan pusat dan harus segera dibubarkan, karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini.

Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada DOM 1989-1998 di Aceh (Muhammad Jafar, 2009:79). Namun sebelum di berlakukan DOM tersebut sebenarnya para anggota GAM banyak melakukan kerusuhan-kerusuhan dan banyak melakukan aksi teror yang sasarannya ABRI serta kepolisian terkadang juga terhadap masyarakat sipil Aceh, keputusan GAM untuk melakukan aksi teror, intimidasi kepada rakyat Aceh dan penyergapan pos-pos ABRI yang cukup gencar, telah menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan terutama di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

Melihat situasi seperti ini Gubernur akhirnya meminta Pangdam I/BB mengambil keputusan tindakan militer sebagai alternatif pilihan yang terbaik (<http://eprints.uny.ac.id/21414/5/5.%20BAB%20III.pdf>). Maka untuk menumpas gerakan separatis tersebut maka pemerintah menggunakan kebijakan DOM serta Darurat Militer sebagai pendekatan militer. Namun hal tersebut malah berdampak pada adanya politik jarak jauh yang dilakukan masyarakat Aceh.

Maka setelah ditetapkan DOM serta darurat militer di Aceh ini dengan keadaan kekerasan yang terjadi, tindak asusila bahkan pembunuhan tanpa pandang bulu yang dilakukan masyarakat Aceh maka masyarakat sipil serta kelompok GAM ketika ditetapkan DOM banyak keluar dan melakukan perjuangan ke luar negeri seperti di Malaysia, Libya dan Genewa (Ziqo Furqan, 2014:49). Dalam melakukan perpolitikan di luar negeri mereka banyak melakukan seperti melakukan pencarian dana untuk konflik yang terjadi dan menyebarkan informasi-informasi menurut (Bustami:2016):

Dalam penyebaran informasi sarana utama penyebaran ideologi GAM khususnya di Aceh ini menggunakan penyebaran dari mulut ke mulut antara pemimpin GAM dan pendukung GAM dan di sampaikan kepada masyarakat yang ada di Aceh. Sarana yang lebih efektif yang dilakukan adalah buletin cetak, terbitan berkala, dan kaset. Anggota-anggota GAM yang ada di Malaysia berperan

besar dalam memproduksi dan menyebarkan materi-materi tersebut. Tulisan-tulisan yang digunakan seperti pencapaian-pencapaian GAM dalam hal positif, serta isu-isu pelanggaran HAM di Aceh selama darurat militer.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa setelah diberlakukannya Aceh menjadi Daerah Operasi Militer banyak masyarakat Aceh yang melakukan eksodus dan dapat dikatakan cukup banyak dari mereka melakukan politik jarak jauh atau mereka melakukan kontribusi akan terjadinya konflik di Aceh ini.

Namun setelah sekian lama akhirnya konflik Aceh berakhir dengan diawali adanya bencana tsunami yang menggemparkan dunia internasional. Akhirnya dengan melibatkan CMI (*Crisis Management Initiative*), maka pada saat itu kedua pihak menandatangani nota kesepahaman damai dan tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga konflik GAM-RI ini berakhir. Salah satu persyaratan terbentuknya perdamaian ini adalah terbentuknya Partai Politik Lokal di Aceh.

Pada saat ini khusus di daerah Aceh partai politik lokal diperkenankan hadir berdampingan dengan partai politik nasional. Beberapa negara demokratis mengizinkan dan memiliki partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan separatisme dan ini tidak dianggap ilegal asalkan partai itu berusaha mencapai tujuannya secara demokratis dan damai. Pasca UUPA disahkan, maka kran demokrasi partai politik lokal dibuka. Menurut Harry Kawilarang (2008:184) ada 20 calon partai politik lokal di Aceh. Namun Setelah melewati proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan melakukan kunjungan ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota maka ditetapkan 6 partai politik lokal yang berhak mengikuti pemilu 2009 (Harry Kawilarang, 2008:186). Menurut Edwin Yustian (2010:81) :

Namun dari keduabelas partai politik lokal tersebut hanya enam partai yang dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum pusat dan dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Keenam partai tersebut adalah Partai Aceh, Partai suara Inependen Rakyat Aceh, Partai Bersatu Atjeh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Damai Aceh.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa setelah lulus verifikasi ada 6 partai yang dapat melakukan pemilihan umum yang akan bersaing dengan partai nasional. Partai politik lokal Aceh yang notabene terhitung baru dalam sistem kepartaian di Indonesia justru menang secara mutlak jauh mengungguli partai-partai

nasional yang telah ada lebih dahulu. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan umum lokal Aceh tahun 2009.

**Sepuluh Besar Perolehan Suara Partai Politik
di Aceh pada Pemilu tahun 2009**

No	Nama Partai Politik	Total	%
1	Partai Aceh	1.007.731	49.91%
2	Partai Demokrat	232.728	10.84%
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	142.411	6.63%
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	83.060	3.80%
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	81.529	3.78%
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	73.964	3.45%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	41.278	1.92%
8	Partai Daulat Aceh	39.706	1.85%
9	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	38.157	1.78%
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	37.336	1.74%

Sumber: Sigit Pamungkas, 2011:222

Adapun pengaruh konflik GAM-RI ini terhadap kehidupan masyarakat Aceh dalam bidang sosialnya yaitu terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dimana Menurut Selo Sumardjan (dalam Nur Mazidah, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.1, April 2011 ISSN: 2089-0192) mengartikan bahwa

perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satuan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk yang di dalam nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat. Dimana perubahan yang terjadi di Aceh akibat konflik GAM-RI ini dapat merubah sistem sosial mereka. Dimana perubahan tersebut adalah terjadinya perubahan sikap masyarakat Aceh serta runtuhnya nilai-nilai adat serta budaya di Aceh.

Karena kebijakan yang dilakukan kurang lebih 30 tahun ini menyeret masyarakat Aceh khususnya warga sipil menjadi korban. Dimasa konflik banyak masyarakat Aceh melakukan pengungsian, dan banyak juga dari mereka yang mengungsi ke luar negeri untuk menghindari konflik GAM-RI yang berakibat terhadap masyarakat sipil Aceh itu sendiri. Misalnya dikutip dari Afadlal (2008:198) :

Di masa konflik, gelombang pengungsi di Gayo umumnya berasal dari wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Warga mengungsi karena beberapa sebab yakni untuk mencari keselamatan sewaktu terjadinya konflik bersenjata atau karena tidak tahan terhadap aksi teror yang dilakukan oleh aparat keamanan. Banyak juga diantaranya warga kampung mengungsi karena ketiadaan jaminan keselamatan jika kembali ke kampung asal atau tidak punya tempat tinggal jika kembali ke kampung halaman karena rumah mereka sudah terbakar.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa di masa konflik ini para penduduk kampung melakukan berbagai pengungsian untuk menjauh dari konflik tersebut. dan banyak dari mereka yang melakukan pengungsian di luar negeri seperti sudah dijelaskan di atas. Namun bagaimana kehidupan masyarakat Aceh yang melakukan eksodus ini, Menurut Antje (2012:99)

Dibandingkan dengan Aceh, Malaysia adalah sebuah negara dan masyarakat yang makmur serta modern. Namun, orang Aceh yang tinggal disana pun tahu bahwa mereka sulit menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan Malaysia untuk warga negaranya. Alih-alih hidup nyaman dan tentram, mayoritas pendatang dari Aceh mengalami kesulitan luar biasa di Malaysia. pengalaman tinggal di negara asing, diperas dan didiskriminasi. Mayoritas imigran gelap Aceh di Malaysia hidup dalam kondisi yang menyedihkan dan miskin, akses kesehatan sangat dibatasi.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa masyarakat Aceh juga banyak merasakan kesulitan karena banyak tindakan diskriminasi di tempat yang mereka tinggali. Hal ini akan menjadikan Hal ini dapat membentuk bagaimana kondisi masyarakat Aceh dalam keadaan mental mereka, karena hampir 30 tahun berkonflik dengan NKRI mereka banyak merasakan suatu kesulitan-kesulitan dan

kejadian yang sangat menyakitkan pada umumnya. Jadi mereka dalam segmentasi sosial mulai bermunculan di Aceh yang berbasis etnik maupun wilayah yang menimbulkan kecurigaan antara satu sama lain bahkan tidak jarang ketegangan sosial yang berujung pada penghakiman (pereksekusian) sepihak terhadap kelompok tertentu (Aryos, 2013:45).

Karena pengalaman yang dirasakan masyarakat Aceh akan penerapan kebijakan pemerintah di Aceh secara logis memang memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat Aceh akibatnya masyarakat merasa trauma dan kehilangan kebebasannya dan mulai kurang percaya terhadap sesama bahkan orang asing.

Dampak dari adanya konflik GAM-RI ini adalah runtuhnya nilai dan norma adat di Aceh. Situasi konflik yang terus melanda tanah Aceh telah menyebabkan terjadinya proses kehancuran sistem adat secara perlahan-lahan, seperti hancurnya kelembagaan adat, hilangnya hak-hak adat dan pendangkalan pemahaman terhadap adat istiadat di Aceh. Serta terjadinya perubahan dalam kebudayaan Aceh itu sendiri. Norma adat istiadat di Aceh yang sudah mulai runtuh ini adalah sistem kenduri, prosesi pernikahan, lembaga adat yang sudah tidak digunakan kembali dan hilangnya sistem tolong menolong seperti adanya gotong royong.

Kenduri dalam masyarakat Aceh ini sebenarnya masih bisa dilaksanakan namun mulai berkurang seperti dikutip dari Nasruddin (2014:35) :

Kenduri turun kesawah yang dilaksanakan masyarakat setempat bila hendak mulai mananam padi. Kenduri itu berisi pengajian Alquran dan *maeunasah* sekurang-kurangnya selama tujuh hari, yang dibaca ialah mulai dari surat al-fatihah terus kebelakang sampai dengan ayat ke berapa saja di akhir hari ketujuh. Pada hari ketujuh baru diadakan kenduri di *meunasah*. Masing-masing warga membawa makanan ke *meunasah*. Setelah kenduri, pada hari dan tanggal yang dianggap baik, yang di tentukan dengan melihat kalender dengan melalui keputusan musyawarah. Tradisi turun kesawah dewasa ini sudah semakin meluntur dan tidak lagi dihiraukan oleh masyarakat Aceh.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa tradisi kenduri turun ke sawah ini mulai ditinggalkan, lalu bagaimana tradisi seperti prosesi pernikahan yang ada di Aceh yang juga sudah mulai di tinggalkan, dikutip dari Perbedaan adat pernikahan di Aceh, yang dikutip dari (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42741/5/Chapter%20I.pdf>)

Dewasa ini adat pernikahan Aceh tidak lagi mengadakan pemisahan antara acara membawa mahar dan sirih, kadang-kadang acaranya di satukan saja. Hal

lain yang sudah ditinggalkan ialah terkait dengan kepercayaan tahayul, dimana orang Aceh zaman dulu mempercayai bahwa setelah datang meminang, maka pada malam harinya harus dilihat, apakah mendapatkan mimpi baik atau mimpi buruk? Jika mimpi tidak baik, maka batalah pernikahannya.

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prosesi pernikahan seperti melakukan kegiatan pemisahan antara pembawaan mahar dan sirih sudah disatukan padahal pada awalnya hal tersebut dilakukan secara terpisah. Dari prosesi pemilihan jodoh yang awalnya dipikirkan orang tua sekarang sudah tidak lagi dan mereka bahkan sudah tidak mempercayai akan mimpi dimalam hari ketika akan melaksanakan pernikahan.

Adapun adat lain yang di tinggalkan selain kenduri dan prosesi pernikahan yang biasanya dilaksanakan. Yakni seperti dikutip dari Afadlal (2008:294) :

Adat istiadat Aceh yang telah ditinggalkan misalnya pertengkaran antar warga saat ini lebih diselesaikan secara hukum, dan bukan secara adat. Dahulu, pertengkaran antar warga didamaikan oleh *imeum meunasah* melalui acara potong kambing dan *peusejuk* dengan maksud agar hati masing-masing pihak yang bertengkar dapat dingin kembali. Tradisi semacam itu kini sudah tidak ada lagi.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian adat istiadat Aceh yang sudah ditinggalkan misalnya yaitu pertengkaran yang dibawa ke jalur hukum bukan pada lembaga adat lagi. Aceh telah mengalami perubahan struktur identitas lokal keacehannya yang biasanya mengedepankan aspek-aspek kebersamaan sudah sangat luntur.

Dan yang terakhir adalah ini tradisi seperti gotong royong nampak sudah tidak ada lagi karena semua tenaga sudah dihitung dengan uang, seperti dikutip dari Afadlal (2008:295) :

Tradisi-tradisi lain seperti gotong royong tampak jelas telah banyak melemah dan dalam beberapa situasi bahkan tidak di kenal lagi. Biasanya ketika saudara membangun rumah maka menyisingkan lengan untuk membantu. Namun, pada dewasa ini hal tersebut praktis tidak mungkin ditemui lagi, mengingat setiap keringat yang dikeluarkan dan tenaga yang dikeluarkan senantiasa di hitung dengan uang. Dengan kata lain, tiada bantuan yang sifatnya cuma-cuma lagi.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya nilai gotong royong yang awalnya sangat mengental dan mudah dilakukan juga sudah mulai menurun karena semua serba di hitung dengan uang. Maka nilai norma adat yang ada di Aceh yang sudah mulai luntur ini sudah penulis jelaskan di atas. Lalu pengaruh

bidang sosial selanjutnya adalah bagaimana kondisi perempuan di Aceh ini ketika konflik dan pasca konflik.

Konflik Aceh yang panjang, dengan tekanan dan ancaman yang beragam, jelas bukan menjadi hal yang mudah untuk menegaknya bantuan kemanusiaan. Ada beberapa yang terlupakan dengan konflik ini yaitu peran aktivis perempuan merupakan salah satu kelompok aktivis yang bertahan untuk ini. Atas semangat kemanusiaan, dengan tujuan kemanusiaan menjalani berbagai siasat, membantu baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Setelah konflik GAM-RI berakhir peran perempuan di Aceh ini masih kurang mendapatkan perhatian, Turunan dari MoU Helsinki baik dari sisi kebijakan maupun implementasi reintegrasi yang dikoordinasikan oleh BRA (*Badan Reintegrasi Damai Aceh*) tidak memprioritaskan perempuan sebagai subyek dan juga penerima manfaat baik dari pihak Pemerintah maupun GAM (Sugiarto:58). Kemudian mari kita lihat dalam struktur BRA seperti yang tertuang dalam website tahun 2008 menurut Anna Christi dalam <http://journal.umy.ac.id> :

Dalam struktur BRA seperti yang tertuang dalam website tahun 2008. Dari 80 orang yang duduk dalam struktur BRA, 15% nya adalah perempuan atau sekitar 12 orang. Ini menunjukkan peran perempuan masih belum sangat kurang, karena setidaknya peran perempuan yang dianjurkan adalah 30% sehingga pengambilan keputusan dapat selalu berperspektif pada kebutuhan perempuan. Salah satu contoh yang memprihatinkan adalah minimnya bantuan yang ditujukan secara langsung pada inong balee di tahun 2007.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa peran perempuan di Aceh ini masih sangat kurang padahal mereka banyak melakukan kiprah untuk menegakkan perdamaian ketika konflik dan setelah konflik ia harus menafkahi anaknya serta menjadi janda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan historisnya yaitu Konflik GAM-RI memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam bidang politik yakni setelah munculnya konflik GAM-RI ini daerah Aceh diberlakukannya Daerah Operasi Militer dan Darurat Militer yang menyebabkan banyak masyarakat Aceh mengungsi dan melakukan perjuangan ke luar negeri seperti di Malaysia, Libya dan Genewa, Amerika serta Australia.

Selain itu pengaruh lainnya adalah Aceh mendapatkan otonomi khusus oleh pemerintahan pusat setelah konflik GAM-RI ini berakhir yakni dengan membentuk partai politik lokal. pembentukan partai politik lokal bertujuan untuk memajukan daerah mereka dengan mengelolanya sendiri.

Konflik GAM-RI juga memiliki pengaruh di bidang sosial, dengan konflik GAM-RI tersebut maka pengaruh dalam bidang sosial ini adalah seperti perbedaan masyarakat Aceh ketika konflik misalnya masyarakat Aceh hidup dalam keadaan tertekan dan selalu mengalami rasa ketakutan-ketakutan, sehingga dengan adanya konflik tersebut masyarakat Aceh juga mulai kurang percaya lagi dengan orang asing karena selalu hidup dalam keadaan tertekan dan ketakutan.

Selain pengaruh tersebut ada pengaruh lain seperti mulai runtuhnya nilai-nilai adat masyarakat Aceh, seperti contoh proses kenduri sudah tidak dilaksanakan secara mendalam lagi, sifat saling membantu misalnya gotong royong sudah tidak ada lagi semua dihitung dengan uang, prosesi pernikahan yang berbeda serta lembaga adat sudah mulai tidak digunakan lagi.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dan hasil pengamatan dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Konflik karena kepemimpinan yang tidak efektif ini banyak terjadi pada organisasi atau kehidupan bersama dalam suatu komunitas. Maka hendaknya secara politis kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kuat, adil, dan demokratis. Kepada pemerintahan pusat hendaknya memperlakukan semua provinsi dengan sama agar tidak menciptakan rasa kesenjangan sosial maupun kecemburuan rakyat terhadap daerah lain, karena hal tersebut dapat berimplikasi dengan menimbulkan konflik.
2. Konflik yang terjadi di Aceh adalah salah satu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat. Maka kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh hendaklah membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, maka hal tersebut tidak akan berdampak pada konflik

Selain itu dalam penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian dimana dalam karya ilmiah ini masih belum cukup sempurna karena dalam keterbatasan atau kelemahan dalam penelitian ini masih ada beberapa permasalahan yang belum dikaji

yakni dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sampai tahun 2012. Maka untuk peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang konflik Aceh sampai terbentuknya perdamaian dapat meneliti bagaimana proses terbentuknya KKR yang ada di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Afadlal,dkk. 2008. *Runtuhnya Gampong di Aceh (Studi Masyarakat Bergejolak)*. Jakarta dan Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI
- Al Chaidar. 1999. *Gerakan Aceh Merdeka (Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam)*. Madani Press (penebar buku aplikasi Islam)
- Bustami. 2016. *Kajian Diaspora Kebudayaan dan Identiti Masyarakat Aceh di Yan Kedah*. Tesis. Universitas Sains Malaysia
- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ombak
- Faisal, Macmud Alrasyid. 24 Juni 2015. *Ciri-Ciri Orang Aceh*. Kompasiana.com diakses tanggal 6 Januari 2017
- Furqon, Ziqo. 2014. *Eksistensi Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (perspektif UU no 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)*. Skripsi. Jakarta: UIN:Syarif Hidayatullah
- Hadi, Syamsul. Widjajanto, Andi dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta : Obor
- Jafar, Muhammad. 2009. *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro
- Jayanti, Kurnia. 2010. *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Kawilarang, Harry. 2008. *Aceh Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Yogyakarta : Bandar Publishing.
- Madjid, Dien M. 2014. *Sejarah Aceh perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Missbach, Antje. 2012. *Politik Jarak jauh Diaspora Aceh*. Yogyakarta : Ombak
- Nasruddin. 2014. Skripsi : *Pengaruh Konflik GAM-RI terhadap Kehidupan Beragama, Politik dan Sosial*. Skripsi. Yogyakarta : UIN Kalijaga
- Nivada, Aryos. 2013. *Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi : Transisi Politik Aceh* Yogyakarta : Ombak.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta : Ombak
- Yustian, Edwin Driyartana. 2010. *Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau dari Asas Demokrasi*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Van Djik Cornelis. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta : Grafiti pers.

